

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S-1)**

OLEH :

ZULMI HERNANDA
NPM : 1902110077



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ZULMI HERNANDA
NPM : 1902110077

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Ulli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Irmawati, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ZULMI HERNANDA
NPM : 1902110077

Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 16 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, SE, M.Si, Ak
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota

Fitri Yunina, SE, M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ **Analisis Kinerja Keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020**”. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.
2. **Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. **Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.** Selaku ketua prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. **Ibu Irmawati, SE, M.Si** selaku dosen pembimbing utama dan **Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM** selaku dosen pembimbing kedua.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis.

6. Tenaga Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi untuk skripsi ini.
7. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.
8. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Zulmy Hernanda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah.....	8
2.1.2 Komponen Pokok Laporan Keuangan	9
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah	11
2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan	11
2.1.3.2 Tujuan Kinerja Keuangan	12
2.1.3.3 Manfaat Kinerja Keuangan	13
2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan	13
2.1.5 Rasio Keuangan	14
2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan	15
2.1.6.1 Keserasian Anggaran	16
2.1.6.2 Efektivitas	18
2.1.6.3 Efisiensi	20
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	26
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	27
3.1.1 Objek Dan Lokasi Penelitian	27
3.1.2 Jenis Penelitian.....	27
3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti.....	28
3.1.4 Horizon Waktu Studi	28
3.1.5 Unit Analisis	28
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 Metode Analisa Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh	34
4.1.1	Sejarah Singkat Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.....	34
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.....	35
4.1.3	Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.....	36
4.1.4	Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.....	39
4.2	Perhitungan Rasio Keuangan	40
4.2.1	Rasio Keserasian	40
4.2.2	Rasio Efektivitas	44
4.2.3	Rasio Efisiensi	47
4.3	Pembahasan	49
4.4.1	Rasio Keserasian	49
4.4.2	Rasio Efektivitas	51
4.4.3	Rasio Efisiensi	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi dan Anggaran Sekretariat Majelis Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014-2018.....	3
Tabel 2.1	Rasio Aktivitas kriteria tingkat belanja operasional terhadap total anggaran belanja dan belanja modal terhadap total anggaran belanja	18
Tabel 2.2	Rasio Efektivitas Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja	20
Tabel 2.3	Rasio Efisiensi kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja	21
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Rasio Aktivitas Kriteria Tingkat Belanja Operasional Terhadap Total Anggaran Belanja Dan Belanja Modal Terhadap Total Anggaran Belanja	31
Tabel 3.2	Rasio Efektivitas Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja	31
Tabel 3.3	Rasio Efisiensi Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja ...	32
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Keuangan	32
Tabel 4.1	Rasio Keserasian Kriteria Tingkat Belanja Operasional Dan Belanja Modal.....	41
Tabel 4.2	Rasio Belanja Operasi Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017-2020	42
Tabel 4.3	Rasio Belanja Modal Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017-2020	44
Tabel 4.4	Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja.....	45
Tabel 4.5	Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017-2020.....	46
Tabel 4.6	Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja	47
Tabel 4.7	Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017-2020	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1	Struktur organisasi pengurus MPD kota banda aceh	37
Gambar 4.2	Struktur organisasi Sekretariat MPD kota banda aceh.....	38

***ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT THE SECRETARIAT
OF THE REGIONAL EDUCATION ASSEMBLY OF
BANDA ACEH CITY, 2017-2020***

By

ZULMY HERNANDA
NPM : 1902110077

Supervisors 1 : Irmawati, SE, M.Si, Ak

Supervisors 2 : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Education Council Secretariat of Banda Aceh City by using the compatibility ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio. This type of research is descriptive qualitative. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data in the form of interviews and secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) of the Banda Aceh City Regional Education Council Secretariat for 2017-2020. Based on the results of the study, it can be seen that the Financial Performance of Expenditures seen from the harmony of regional expenditures in general shows that most of the expenditure funds are allocated for operating expenditures and only a few percent are allocated for capital expenditures. During 2017-2020 the average Operating Expenditure was 92.44% while Capital Expenditure was 2.59%. Based on the calculation of the Effectiveness Ratio shows that the results obtained are already in the effective category in realizing the planned income, this is indicated by the increasing effectiveness ratio that has been calculated, namely 102.16%, 87.14%, 97.91% and 93, 77%. Financial Performance can be seen from the efficiency of Regional Expenditures that the realization of the expenditure budget does not exceed the budget. This means that the Secretariat of the Banda Aceh City Regional Education Council in 2017-2020 has made spending efficiency this is because from 2017-2020 there is no percentage that exceeds 100%.

Keywords : Harmony, Effectiveness, Efficiency, and Budget.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017-2020

Oleh

ZULMY HERNANDA
NPM : 1902110077

Pembimbing 1 : Irmawati, SE, M.Si, Ak

Pembimbing 2 : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dengan menggunakan rasio keserasian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kinerja Keuangan Belanja dilihat dari Keserasian belanja daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal. Selama tahun 2017-2020 rata-rata Belanja Operasi sebesar 92,44% sedangkan Belanja Modal sebesar 2,59%. Berdasarkan Perhitungan dari Rasio Efektifitas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sudah berada dalam kategori efektif dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan hal ini ditunjukkan dengan masih meningkatnya rasio efektifitas yang telah dihitung yaitu sebesar 102,16%, 87,14%, 97,91% dan 93, 77%. Kinerja Keuangan dapat dilihat dari efisiensi Belanja Daerah bahwa realisasi anggaran belanja tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Artinya Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 telah melakukan efisiensi belanja hal ini disebabkan dari tahun 2017- 2020 tidak terdapat persentase yang melebihi 100%.

Kata kunci: Keserasian, Efektivitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencanan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Era otonomi daerah telah mengubah paradigma perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari sistem perencanaan sentralistik menjadi sistem perencanaan desentralisasi atau sistem dari atas ke bawah (*Top-Down*) ke sistem dari bawah ke atas (*Bottom-UP*), dari pembangunan daerah menjadi daerah membangun. Dengan adanya perubahan paradigma perencanaan tersebut, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Dalam perkembangan dunia usaha modern, manajemen dituntut dalam menilai kinerja keuangan yang efektif dan efisien agar penilaian yang diperoleh cepat dan akurat. Informasi yang paling bernilai bagi pengguna atau penerima laporan keuangan adalah yang berhubungan dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hampir tidak ada satupun kegiatan

pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah menjadi satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya.

Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah disusun secara umum.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan analisis rasio keuangan, pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugasnya, mengukur efektivitas dan efisiensi kemampuan dalam merealisasikan Belanja Asli Daerah (BAD), kinerja keuangan juga mengukur aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya apakah lebih dominan pada belanja rutin atau belanja pembangunan, serta dalam pertumbuhan bagaimana pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan maupun meningkatkan kinerja yang telah dicapainya, serta kebutuhan fiskal untuk mendukung pelayanan publik bagi masyarakat diwilayah kerjanya, kapasitas fiskal yang merupakan ukuran apakah daerah mampu untuk membiayai sendiri kebutuhan fiskalnya dalam upaya fiskal untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhannya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi khusus Aceh secara optimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang meliputi kewenangan khusus, kelembagaan khusus dan pengelolaan dana otonomi khusus. Perlu diterapkan suatu standar atau acuan pada sistem pengelolaan keuangan daerah di otonomi khusus yaitu terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah bisa dikatakan baik, positif, seimbang, dan efisien. Untuk itu diperlukan suatu analisis kinerja keuangan sebagai perbandingan dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Berikut ini laporan realisasi dan anggaran Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Tahun 2017-2020:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada
Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Surplus	Persentase %
2017	1.087.492.506	1.110.973.443	(23.480.937)	102,16%
2018	1.282.989.377	1.117.948.680	165.040.697	87,14%
2019	1.576.820.114	1.543.833.337	32.986.777	97,91%
2020	2.556.223.261	2.396.945.389	159.277.872	93,77%

Sumber : Kasubbag Keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh (data diolah, 2021)

Pada Tabel 1.1 menjelaskan rencana dan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh relatif berfluktuasi setiap tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangannya sudah tercapai dengan baik namun masih ada juga kekurangan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan membengkaknya anggaran belanja daripada realisasinya. Pada tahun 2020 anggaran untuk belanja

pegawai dalam APBD Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh mencapai 2.556.223.261 dengan realisasi mencapai 2.396.945.389 dari total belanja tahun 2019.

Berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan di daerah, dengan adanya otonomi daerah maka pengelolaan diharapkan daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya bagi sektor-sektor prioritas pembangunan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja dan bagian dari perencanaan operasional anggaran belanja serta alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan adalah kebijakan penyusunan program kegiatan pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan perencanaan anggaran belanja yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif dan transparan. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah wajib

melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Matutina (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan belanja dilihat dari Varians Belanja secara umum dapat dikatakan baik jika realisasi belanja selalu lebih kecil daripada anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja, pertumbuhan belanja MRP secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif jika mengalami pertumbuhan secara positif, keserasian belanja dinilai tidak seimbang disebabkan oleh sebagian dana dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal, dan efisiensi belanja secara umum telah melakukan efisiensi belanja.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari, Mintarti dan Pattisahusiwa (2018). menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran cukup bervariasi. hal ini karena realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Misalkan saja anggaran belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. Walaupun perbedaan ini terjadi karena ada beberapa anggaran belanja yang direalisasikan tidak sesuai dengan target, tetapi anggaran belanja yang lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mengetahui kinerja keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk mengevaluasi apakah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh telah

menggunakan APBD secara ekonomis, efektif dan efisien. Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “ **Analisis Kinerja Keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kinerja Keuangan Daerah pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Keuangan Daerah pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai anggaran pendapatan belanja dan daerah.

2. Manfaat akademis

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang mendalami masalah akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020”

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Kasmir (2013:7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:5) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dalam sebuah entitas. Yang mempunyai tujuan umum sebagai penyaji informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari suatu entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan yang ekonomis bagi penggunanya.

Dari berbagai uraian di atas dapat dikatakan, bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang ringkas berupa data keuangan dan aktivitas dari suatu lembaga atau perusahaan yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta suatu kinerja pada jangka waktu tertentu.

2.1.2 Komponen Pokok Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Mardiasmo (2012:103) juga menyatakan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan seberapa besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi pegawai, dan sebagai alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Dalam penyusunannya APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Permedagri No. 13 Tahun 2006 pasal 15 dan pasal 16 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Abdul Halim (2008:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan. Kinerja keuangan menurut Fahmi (2011:142) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan dan menggunakan anggaran dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan menurut Izati dan Margaretha (2014:21) bahwa : “Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu entitas yang dianalisis dengan alat-alat

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu entitas yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu”.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah evaluasi laporan keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas pada waktu dan jangka tertentu. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2012:122) yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi permohonan kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
4. Sebagai alat mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.1.3.3 Manfaat Kinerja Keuangan

Menurut Tika (2012:124), manfaat dari pengukuran kinerja dalam beberapa bentuk antara lain:

1. Sistem assessment yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan entitas atau posisi suatu sistem.
2. Program planning yaitu membantu penilaian aktivitas aktivitas dalam program tertentu khususnya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi ketimpangan yang timbul.
3. Program implementation yaitu menyiapkan informasi apakah program suatu yang sudah diterapkan telah dilaksanakan secara tepat sesuai dengan rencana.
4. Program improvement yaitu memberikan informasi tentang bagaimana program kerja dapat berfungsi, bagaimana pelaksanaan program kerja dan kendalakendala apa yang dihadapi.
5. Program certification yaitu memberikan informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat program kerja.

2.1.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Robertson (2002) dalam Mahsun, dkk (2013: 141), “pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Menurut Syahrani (2014:5) pengukuran kinerja memiliki esensi yang jelas karena melalui pengukuran kinerja dapat diketahui aspek-aspek apa yang dapat dijadikan parameter mengenai kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kinerja dapat dilihat melalui beberapa aspek sebagai berikut :

1. *Quality*, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang di harapkan.
2. *Quantity*, merupakan jumlah yang dihasilkan misalnya jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan dan lain-lain.
3. *Timeline*, merupakan tingkat sejauh mana kegiatan dilaksanakan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi, output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain.
4. *Cost Effectiveness*, sejauh mana penggunaan daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber daya.
5. *Need For Supervision*, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan tanpa seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.
6. *Interpersonal Impact*, menilai tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja.

2.1.5 Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dalam suatu laporan keuangan (*Financial Statement*). Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca (*Balance Sheet*) dan laporan laba rugi (*Income Statement*). Neraca menggambarkan posisi aset, hutang, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Laporan laba rugi mencerminkan hasil yang dicapai oleh perusahaan selama suatu periode tertentu.

Menurut Kasmir (2015:104), menyatakan bahwa rasio keuangan adalah: Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada diantara laporan keuangan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki

hubungan serta dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu.

2.1.6 Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2006:112), “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Mulyadi (2007), kinerja yang merupakan keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

2.1.6.1 KecerAsian

Rasio KecerAsian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Menurut Mahmudi (2016:160) kecerAsian belanja adalah keseimbangan antar belanja. KecerAsian belanja bagi pemerintah daerah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Dengan adanya kecerAsian belanja maka setiap pemerintah daerah dapat mengalokasi anggaran belanja yang menjadi prioritas belanja sesuai peruntukannya. Analisis KecerAsian Belanja Daerah meliputi:

a. Rasio Belanja Operasi

Menurut Mahmudi (2016: 162) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat

pendapatannya rendah. Menurut Mahmudi (2016: 162) rumus untuk menghitung belanja operasi terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2011 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Menurut Mahmudi (2016: 163) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat penilaian belanja operasi terhadap total belanja, dan belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rasio Aktivitas
Kriteria Tingkat Belanja Operasional terhadap Total
Anggaran Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Anggaran Belanja

Kriteria Penilaian	Proporsi	Jika sesuai dengan proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang
Belanja Operasi terhadap Total Anggaran Belanja	60 – 90 %	
Belanja Modal terhadap Total Anggaran Belanja	5 – 20 %	

Sumber: Mahmudi (2016:164)

2.1.6.2 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil tepat. Dengan kata lain efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan di dalam setiap organisasi swasta maupun pemerintahan, kegiatan ataupun program yang sedang dijalankan disebut efektif apabila tercapainya tujuan seperti yang telah ditentukan.

Menurut Halim dan Iqbal (2012:163), efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan penyelesaian 3 kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011:161), efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut Ravianto (2014:11), mendefinisikan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Prihartono (2012:37) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Sasaran ini merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah. Setiap pekerjaan pegawai dalam pemerintah sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Berikut tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2014:187):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Rasio Efektivitas
Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun (2014:187)

2.1.6.3 Rasio Efisiensi

Simanjunyak dan Muklis (2012:17), berpendapat bahwa efisiensi yang direncanakan dengan cara produksi dengan biaya murah tetapi tetap dengan sesuai harapan, baik mutu dan barang yang diproduksi maupun pelayannya. Menurut Halim dan Iqbal (2012:163), Mendefinisikan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara *input* yang digunakan terhadap *output* yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang terendah. Nordiawan dan Hertianti (2011:161), Mendefinisikan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan.

Analisis Efisiensi sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah untuk

mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu.

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara yaitu:

- a. Menaikkan output untuk input yang sama
- b. Menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input
- c. Menurunkan input untuk output yang sama

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efesiensi merupakan sebagai hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif, karena hasil yang dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur efesiensi adalah sebagai berikut (Mahsun, 2014:187):

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Rasio Efesiensi
Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja

Rasio Efesiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2014:188)

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menelusuri penelitian lain yang berhubungan dengan Kinerja Keuangan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Sandy (2018) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana “, diperoleh kesimpulan bahwa dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk dalam kategori baik, dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk dalam kategori baik. Dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional, Dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

Novita Sari, Mintarti dan Pattisahusiwa (2018) Meneliti mengenai Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Hasil penelitian berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, bahwa Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah kota samarinda pada tahun anggaran 2011 – 2015 cukup bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 dan yang terendah pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2015 dikatakan kurang efektif. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pemerintah kota samarinda tahun anggaran 2011 – 2015 secara keseluruhan sudah dikelola secara baik. Dimana tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sultan (2016) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone” diperoleh kesimpulan bahwa Keseimbangan antara pendapatan dan belanja

daerah ini karena kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menentukan pos-pos pendapatan strategi berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah serta mampu dalam memprioritaskan pembelanjaan daerah. Anggaran daerah baik pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara penyusunan anggaran dan realisasi anggaran sudah tepat guna.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Matutina (2017) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura Tahun 2011-2015” diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan belanja Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura dilihat dari Varians Belanja secara umum dapat dikatakan baik, pertumbuhan belanja MRP secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, keserasian belanja MRP dinilai tidak seimbang disebabkan oleh sebagian dana dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal, dan efisiensi belanja MRP secara umum telah melakukan efisiensi belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati, Anim (2017) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja keuangan dapat diambil beberapa simpulan diantaranya, efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% pada tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian

besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih sangat rendah.

Dari paparan yang telah dikemukakan, maka dapat diringkas dalam tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Saputra, Sandy dkk (2018)	Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja keuangan dapat diambil beberapa simpulan diantaranya : 1. dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk dalam kategori baik,dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk dalam kategori baik. 2. dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional, 3. dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.	Metode analisis data : -Rasio Aktivitas -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi	Periode rentang waktu penelitian dan objek penelitian.
2.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Sari, Mintarti dan Pattisahusiwa (2018).	Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2011 – 2015 cukup bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 dan yang terendah pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2015 dikatakan kurang efektif, efesiensi pelaksanaan anggaran belanja daerah pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2011 - 2015 secara keseluruhan sudah dikelola secara baik. Pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dikategorikan efisien.	Aktivitas -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi	Periode rentang waktu penelitian dan objek penelitian.

Tabel 2.4 Lanjutan

3.	Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura Tahun 2011-2015 Matutina (2017)	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja Majelis Rakyat Papua (MRP) Kota Jayapura dilihat dari Varians Belanja secara umum dapat dikatakan baik, pertumbuhan belanja MRP secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, keserasian belanja MRP dinilai tidak seimbang disebabkan oleh sebagian dana dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal, dan efisiensi belanja MRP secara umum telah melakukan efisiensi belanja.	Aktivitas -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi -Rasio Aktivitas	Periode rentang waktu penelitian dan objek penelitian.
4.	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone Sultan (2016)	Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah ini karena kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone dalam menentukan pos-pos pendapatan strategi berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah serta mampu dalam memprioritaskan pembelanjaan daerah. Anggaran daerah baik pendapatan maupun belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan antara penyusunan anggaran dan realisasi anggaran sudah tepat guna	Metode analisis data : -Rasio Aktivitas -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi	Periode rentang waktu penelitian dan objek penelitian.
5.	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 Rahmayati, Anim (2016)	Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan diantaranya : 1. Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan. 2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. 3. Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang	Metode analisis data : -Rasio Aktivitas -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi	Periode rentang waktu penelitian dan objek penelitian.

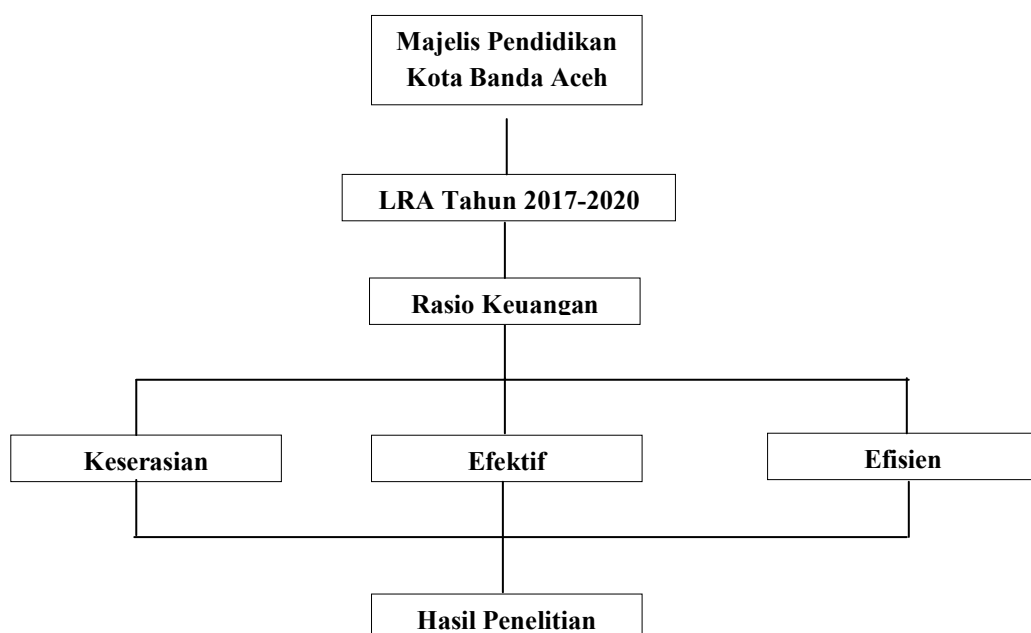
Sumber : Data diolah (2021)

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:93) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Fungsi penyusunan kerangka pemikiran untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penyelesaian suatu permasalahan, desain penelitian berisi tentang langkah-langkah kegiatan penelitian ini dilakukan di Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2017-2020.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian dianalisis dengan rasio keuangan yang telah ditetapkan. Hasil analisis rasio keuangan tersebut akan dibuat kesimpulan dan kemudian akan direkomendasikan kepada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Secara ringkas kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 Berikut:

Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran



Sumber : data diolah (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen; yaitu tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh yang berlokasi di Jl. H.T. Daudsyah No. 61 Peunayong, Banda Aceh. Objek penelitian data yang berhubungan dengan kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio aktivitas, analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Selain itu juga disajikan beberapa informasi tambahan mengenai gambaran umum Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri. Variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen yang dapat dibandingkan atau di pasangkan dengan variabel lain, variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen” (Sugiyono, 2012: 53). Ditinjau dari

jenis data yang digunakan maka dalam jenis penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya dengan fokus pada tingkat rasio aktivitas, efektivitas dan efisiensi belanja anggaran pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020.

3.1.4 Horizon Waktu Studi

Penelitian ini menggunakan metode *time series* yaitu data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari satu tahun pada suatu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini memiliki runtun waktu 4 (Empat) tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

3.1.5 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu Bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data yang dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan Bendahara keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh. Data sekunder yaitu terdiri dari dokumen Laporan realisasi anggaran (LRA) atau biasa disebut APBD.

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada Kepala bagian Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2015-2018. Untuk mengetahui sejarah perusahaan, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan dasar acuan pencatatan yang telah tersedia berupa laporan keuangan perusahaan.

3. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat pembinaan yang terjadi.

3.3 Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2013:54), metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, sesuatu set kondisi, sesuatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

1. Tingkat rasio aktivitas dibagi 2 bagian yaitu :

- a. Rasio belanja operasi, diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja operasional dengan total anggaran belanja. (Mahmudi 2016:162) :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

- b. Rasio belanja modal, diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja modal dengan total anggaran belanja. (Mahmudi 2016:162) :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat penilaian belanja operasi terhadap total belanja, dan belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rasio Aktivitas
Kriteria Tingkat Belanja Operasional terhadap Total
Anggaran Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Anggaran Belanja

Kriteria Penilaian	Proporsi	Jika sesuai dengan proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang
Belanja Operasi terhadap Total Anggaran Belanja	60 – 90 %	
Belanja Modal terhadap Total Anggaran Belanja	5 – 20 %	

Sumber: Mahmudi (2016:164)

2. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja Mahsun (2014:187) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat efektivitas anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Rasio Efektivitas
Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun (2014:187)

3. Tingkat efesiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja Mahsun (2014:187) :

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman untuk melihat tingkat efesiensi anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Rasio Efesiensi
Kriteria Tingkat Efesiensi Anggaran Belanja

Rasio Efesiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2014:188)

Dari Penjelasan diatas, dapat diringkas tabel kinerja keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Keuangan

Rasio	Definisi	Rumus
Rasio Aktivitas	Rasio belanja operasi, diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja operasional dengan total anggaran belanja. (Mahmudi 2016:162	$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$
	Rasio belanja modal, diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja modal dengan total anggaran belanja. (Mahmudi 2016:162	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$
Rasio Efektivitas	Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

Tabel 3.4 Lanjutan

Rasio	Definisi	Rumus
	belanja dengan anggaran belanja Mahsun (2014:187)	
Rasio Efisiensi	Tingkat efesiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja Mahsun (2014:187)	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$

Sumber : Data Diolah (2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independent dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Banda Aceh, yang mempunyai tugas “Memberikan pertimbangan kepada pemerintah kota, menyusun konsep pendidikan berbasis islami sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Banda Aceh memiliki fungsi sebagai , pemikir mengenai pembangunan pendidikan kota, Pemberi pertimbangan kepada pemerintah kota di bidang pendidikan, penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan penyelenggara pendidikan untuk berinovasi serta berprestasi dan mengembangkan sistem pendidikan kota.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Banda Aceh beralamat Jl. H.T. Daudsyah, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. MPD Aceh dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 atau sudah sekitar 31 tahun sampai dengan sekarang. Jumlah pegawai Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD)

Kota Banda Aceh berjumlah 16 orang, yang dimana 11 orang adalah pegawai tetap dan 5 diantaranya adalah tenaga kontrak.

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Banda Aceh sebagai unsur yang membantu Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh dalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan guna mewujudkan peran Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh dalam upaya pengembangan sistem pendidikan Islami dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2010 tentang Keistimewaan Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh

Dalam Qanun Aceh nomor 3 tahun 2006 telah ditetapkan visi MPD yang dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadikan MPD sebagai badan berbasis masyarakat yang bersifat normatif, proaktif dalam mengaktualisasikan perannya secara optimal sebagai mitra pemerintah daerah dan masyarakat aceh dalam melahirkan kebijakankebijakan pendidikan yang aspiratif, relevan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya masyarakat yang cerdas, maju, beriman dan bertaqwa, serta berakhlak mulia” .

Adapun misi MPD dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan di Aceh yang alami

2. Menyusun konsep pembaharuan dan meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan filsafat bangsa dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh yang islami.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pendidikan.
4. Menilai dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan pendidikan.
5. Memotivasi masyarakat pada umumnya untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan, serta masyarakat pendidikan pada khususnya untuk berinovasi dan berprestasi.

4.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh

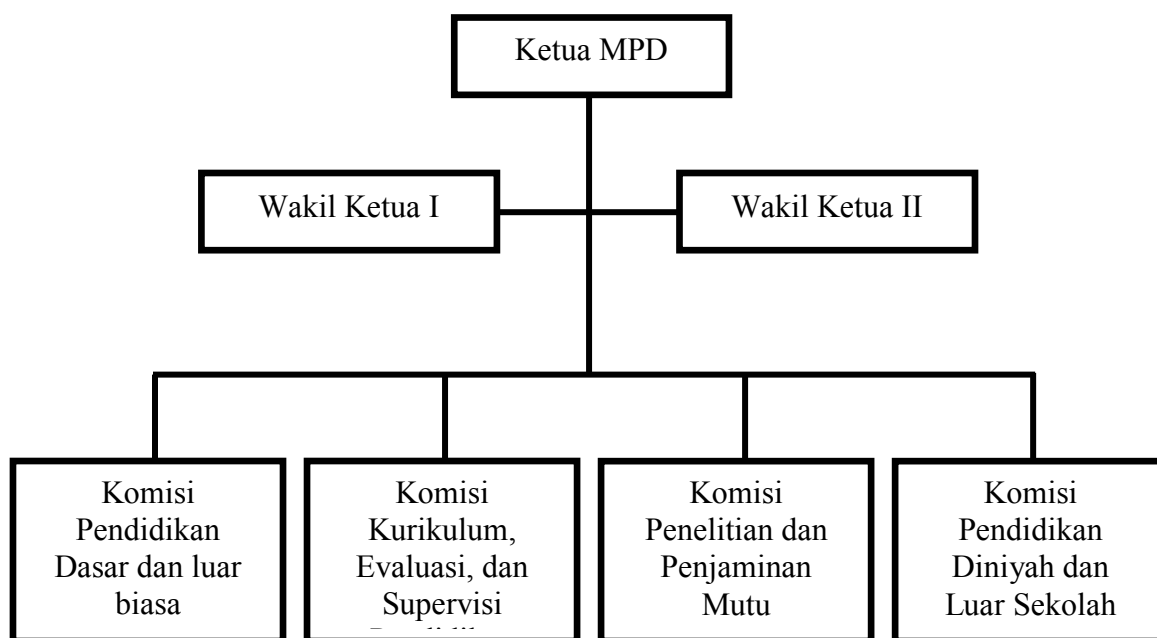
Susunan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh
 Pimpinan mempunyai tugas memimpin, memberikan pertimbangan, menyusun konsep pendidikan berbasis islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 - a. 1 Orang Ketua
 - b. 2 Orang Wakil
 - c. 4 Orang Anggota
2. Komisi
 Komisi mempunyai tugas membuat program operasional yang berkenaan dengan bidangnya, menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data dan melakukan pembahasan awal serta melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh.

Adapun susunan struktur organisasinya sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengurus MPD Kota Banda Aceh

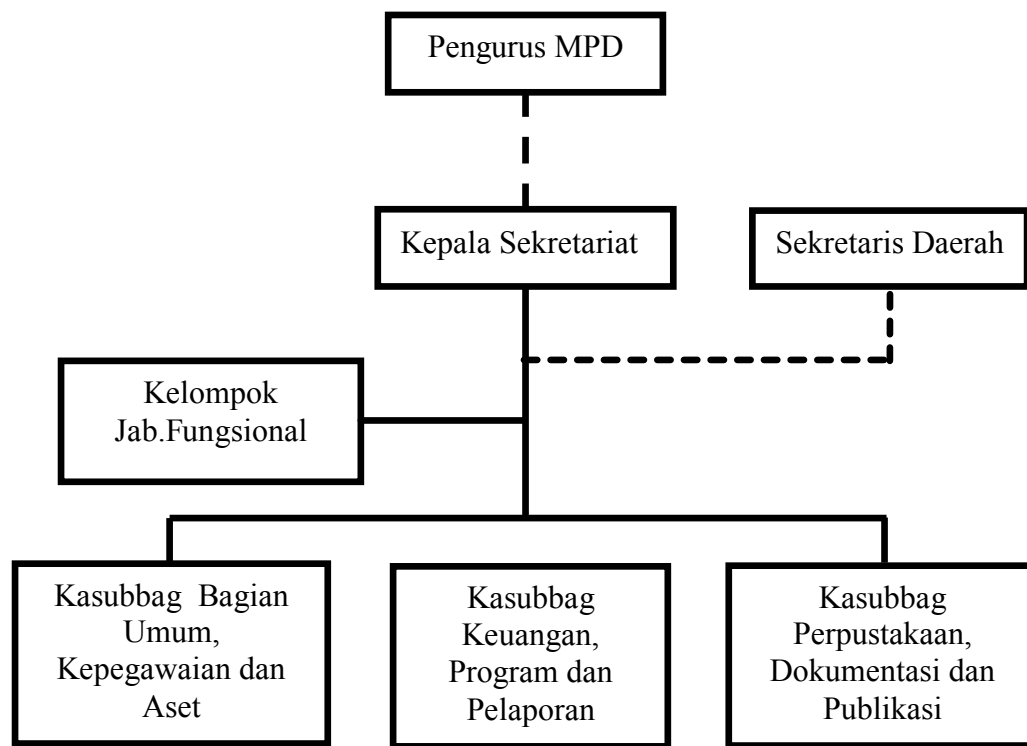


Sumber : Majelis Pendidikan Kora Banda Aceh (2021)

3. Sekretariat

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set.MPD) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 5 tahun 2010 Tentang Keistimewaan Aceh dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Sekretariat MPD Kota Banda Aceh



Sumber : Majelis Pendidikan Kora Banda Aceh (2021)

Adapun Fungsi dan tugas pokok sebagai berikut :

a. Kepala Sekretariat :

Kepala sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh.

b. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja Subbagian Umum, melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, memfasilitasi rapat anggota Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh.

c. Sub Bagian Keuangan dan Program serta Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Banda Aceh

d. Subbagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada Subbagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi, menyusun pidato/sambutan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (set. MPD) Kota Banda Aceh.

4.1.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh telah memberikan masukan, nasehat, saran-saran dalam penentuan kebijakan daerah di bidang pendidikan. Dengan adanya dukungan dari pimpinan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan berbasis Islami.

Adapun juga mengenai capaian pelaksanaan pendidikan sejauh ini antara lain:

1. Terlaksananya pendidikan dasar pada seluruh wilayah Kota Banda Aceh.
2. Telah dilakukan sosialisasi pendidikan berkarakter.
3. Meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan diniyah.
4. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sekolah di Kota Banda Aceh.

5. Adanya dukungan nyata dari pimpinan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Islam dan lembaga masyarakat untuk dapat meningkatnya pelaksanaan pendidikan berbasis islami.
6. Sudah adanya kepedulian dari stakeholders lainnya dalam rangka suksesnya proses pendidikan di Kota Banda Aceh.

4.2 Perhitungan Rasio Keuangan

Penelitian ini menggunakan analisis belanja daerah yang terbagi atas rasio aktivitas, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

4.2.1 Rasio Kesenjangan

Rasio Kesenjangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

untuk melihat tingkat penilaian belanja operasi terhadap total belanja, dan belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rasio Kecerasan
Kriteria Tingkat Belanja Operasional dan Belanja Modal

Kriteria Penilaian	Proporsi	Jika sesuai dengan proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang
Belanja Operasi terhadap Total Anggaran Belanja	60 – 90 %	
Belanja Modal terhadap Total Anggaran Belanja	5 – 20 %	

Sumber: Mahmudi (2016:164)

Berdasarkan hasil pengamatan pada anggaran belanja dan realisasi belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020, maka Rasio Kecerasan dibagi dua bagian sebagai berikut:

1. Rasio belanja operasi

$$2017 = \frac{1.091.973.443}{1.087.492.506} \times 100\% = 100,41\%$$

$$2018 = \frac{1.117.948.680}{1.282.989.337} \times 100\% = 87,14\%$$

$$2019 = \frac{1.466.213.982}{1.576.820.114} \times 100\% = 92,99\%$$

$$2020 = \frac{2.281.295.389}{2.556.223.261} \times 100\% = 89,24\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja operasi pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 mengalami penurunan . Pada tahun 2017 realisasi belanja operasi sebesar 1.091.973.443 dengan total anggaran 1.087.492.506 dengan persentase 100,41%. Pada tahun 2018 realisasi belanja operasi

sebesar 1.117.948.680 dengan total anggaran 1.087.492.506 dengan persentase 87,14%. Pada Tahun 2019 realisasi belanja operasi sebesar 1.466.213.982 dengan total anggaran 1.576.820.114 dengan persentase 92,99%. Kemudian pada Tahun 2020 realisasi belanja modal sebesar 2.281.295.389 dengan total anggaran 2.556.223.261 dengan persentase 4,52%. Analisa Belanja Operasi terhadap Total Anggaran seluruh kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.2
Rasio Belanja Operasi Terhadap Anggaran Belanja
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi	Rata-Rata	Keterangan
2017	1.091.973.443	1.087.492.506	100,41%	92,44%	Tidak Seimbang
2018	1.117.948.680	1.282.989.377	87,14%		
2019	1.466.213.982	1.576.820.114	92,99%		
2020	2.281.295.389	2.556.223.261	89,24%		

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 4.2 analisa Belanja Operasi kinerja keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami penurunan yang signifikan. Tingkat persentase belanja operasi pada tahun 2017 adalah sebesar 100,41%, tahun 2018 adalah sebesar 87,14%, tahun 2019 adalah sebesar 92,99% dan tahun 2020 adalah sebesar 89,24%. Rata – rata rasio belanja operasi sebesar 92,44% dan berada di katogeri tidak seimbang karena tidak berada dalam proporsi penilaian rasio belanja operasi yaitu sebesar 60-90%.

2. Rasio belanja Modal

$$2017 = \frac{10.000.000}{1.087.492.506} \times 100\% = 0,92\%$$

$$2018 = \frac{0}{1.282.989.337} \times 100\% = 0\%$$

$$2019 = \frac{77.619.355}{1.576.820.114} \times 100\% = 4,92\%$$

$$2020 = \frac{115.650.000}{2.556.223.261} \times 100\% = 4,52\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi belanja modal sebesar 10.000.000 dengan total anggaran 1.087.492.506 dengan persentase 0,92%. tahun 2018 tidak ada realisasi belanja karena tidak adanya belanja modal dari anggaran sebesar 1.282.989.337 dengan persentase 0%. Pada Tahun 2019 realisasi belanja modal sebesar 77.619.355 dengan total anggaran 1.576.820.114 dengan persentase 4,92%. Kemudian pada Tahun 2020 realisasi belanja modal sebesar 115.650.000 dengan total anggaran 2.556.223.261 dengan persentase 4,52%. Analisa Belanja Modal terhadap Total Anggaran seluruh kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.3
Rasio Belanja Modal Terhadap Anggaran Belanja
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Operasi	Rata-Rata	Keterangan
2017	10.000.000	1.087.492.506	0,92%	2,59%	Tidak Seimbang
2018	0	1.282.989.377	0,00%		
2019	77.619.355	1.576.820.114	4,92%		
2020	115.650.000	2.556.223.261	4,52%		

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan analisa Belanja Operasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Kinerja Keuangan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dengan rasio rata-rata sebesar 2,59% dan berada di kategori tidak seimbang. Tingkat persentase belanja modal pada tahun 2018 adalah sebesar 0% hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal dan menyebabkan tidak seimbangnya rasio belanja modal terhadap anggaran belanja.

4.2.2 Rasio Efektivitas

efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah. Setiap pekerjaan pegawai dalam pemerintah sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Untuk melihat tingkat efektivitas anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun (2014:187)

Berdasarkan hasil pengamatan pada anggaran belanja dan realisasi belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2020, maka Rasio Efektivitas sebagai berikut:

$$2017 = \frac{1.087.492.506}{1.110.973.443} \times 100\% = 102,16\%$$

$$2018 = \frac{1.282.989.377}{1.117.948.680} \times 100\% = 87,14\%$$

$$2019 = \frac{1.576.820.114}{1.543.833.337} \times 100\% = 97,91\%$$

$$2020 = \frac{2.556.820.114}{2.396.945.389} \times 100\% = 93,77\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, pada tahun 2017 anggaran belanja mencapai 1.087.492.506 dan realiasi sebesar 1.110.973.443 dengan persentase sebesar 102,16%. Tahun 2018 anggaran belanja mencapai 1.282.989.377 dan realiasi sebesar 1.117.948.680 dengan persentase sebesar 87,14%. Tahun 2019 anggaran belanja mencapai 1.576.820.114 dan realiasi sebesar 1.543.833.337 dengan persentase sebesar 97,91%. Kemudian pada tahun 2020 anggaran belanja mencapai 2.556.820.114 dan realiasi sebesar

2.396.945.389 dengan persentase sebesar 93,77%. Analisa Rasio Efektivitas seluruh kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.5
Rasio Efektivitas
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efektivitas	Rasio
2017	1.087.492.506	1.110.973.443	102,16%	Sangat Efektif
2018	1.282.989.377	1.117.948.680	87,14%	Cukup Efektif
2019	1.576.820.114	1.543.833.337	97,91%	Efektif
2020	2.556.223.261	2.396.945.389	93,77%	Efektif

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan perubahan tingkat efektivitas belanja pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2020. Tingkat persentase efektivitas belanja pada tahun 2017 adalah sebesar 102,16% berada dikategori sangat efektif, tahun 2018 adalah sebesar 87,14% berada dikategori cukup efektif, tahun 2019 adalah sebesar 97,91% % berada dikategoti efektif dan tahun 2020 adalah sebesar 93,77% % berada dikategoti efektif . jadi efektivitas Belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2020 telah efektif. Persentase tahun 2017-2020 ini masih diatas 80%, sehingga dapat dikatakan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh telah mampu melakukan efektivitas belanja pada tahun tahun anggaran 2017-2020 .

4.2.3 Rasio Efisiensi

Untuk melihat tingkat efisiensi anggaran belanja, maka dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Kriteria Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahsun (2014:188)

Berdasarkan hasil pengamatan pada anggaran belanja dan realisasi belanja langsung Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2020, maka Rasio Efisiensi sebagai berikut:

$$2017 = \frac{1.110.973.443}{312.776.060} \times 100\% = 28,15\%$$

$$2018 = \frac{1.117.948.680}{311.022.450} \times 100\% = 27,82\%$$

$$2019 = \frac{1.543.833.337}{559.675.355} \times 100\% = 36,25\%$$

$$2020 = \frac{2.396.945.337}{1.257.398.537} \times 100\% = 52,46\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh, pada tahun 2017 anggaran belanja mencapai 1.110.973.443 dan realiasi belanja langsung sebesar 312.776.060 dengan persentase sebesar 28,15%. Tahun 2018 anggaran belanja mencapai 1.117.948.680 dan realiasi belanja langsung

sebesar 311.022.450 dengan persentase sebesar 27,82%. Tahun 2019 anggaran belanja mencapai 1.543.833.337 dan realiasi belanja langsung sebesar 559.675.335 dengan persentase sebesar 36,25%. Kemudian pada tahun 2020 anggaran belanja mencapai 2.396.945.389 dan realiasi belanja langsung sebesar 1.257.398.537 dengan persentase sebesar 52,46%. Analisa Rasio Efisiensi seluruh kegiatan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.7
Rasio Efisiensi
Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Tingkat Efektivitas	Rasio
2017	1.110.973.443	312.776.060	28,15%	Sangat Efisien
2018	1.117.948.680	311.022.450	27,82%	Sangat Efisien
2019	1.543.833.337	559.675.355	36,25%	Sangat Efisien
2020	2.396.945.389	1.257.398.537	52,46%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan perubahan tingkat efisiensi belanja pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2020. Tingkat persentase efisiensi belanja pada tahun 2017 adalah sebesar 28,15% dan berada dikategori sangat efisien, tahun 2018 adalah sebesar 27,82% berada dikategori sangat efisien, tahun 2019 adalah sebesar 36,25% berada dikategori sangat efisien ,tahun 2020 adalah sebesar 52,46% berada dikategori sangat efisien . Efisiensi Belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2020 sangat efisien. Persentase tahun dari 2017-2020 terus mengalami peningkatan namun ini masih stabil di bawah 60%, sehingga dapat dikatakan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh telah mampu melakukan efektivitas belanja pada tahun tahun anggaran 2017-2020 .

4.3 Pembahasan

4.3.1 Rasio Keserasian

1. Rasio Belanja Operasi

Analisis belanja operasi terhadap total belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pada tahun 2017 belanja operasi sebesar 1.091.973.443 atau sebesar 100,41% dari total realisasi belanja. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 13,28% dengan angka realisasi belanja operasi sebesar 1.117.948.680 atau 87,14% dari total realisasi belanja, pada tahun 2019 terjadi kenaikan tapi tidak begitu signifikan yaitu sebesar 5,85% dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi belanja sebesar 1.466.213.982. Tahun 2020 persentase realisasi belanja operasi mencapai angka 89,24% atau mengalami penurunan sebesar 3,74% dimana semua realisasi belanja pada tahun tersebut yang sebesar 2.281.295.389 habis dipakai untuk belanja operasi seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Dari hasil tersebut belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dinilai tidak seimbang karena memprioritaskan sebagian besar dana untuk belanja operasi. Selama tahun 2017-2020 rata-rata belanja operasi sebesar 92,44%. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2016: 162)

pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen sedangkan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh melebihi proporsi belanja operasi yaitu sebesar 92,44% maka dapat dikatakan tidak seimbang. Dengan demikian Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh harus segera membenahi anggaran dalam halnya belanja operasi agar dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu menengah ataupun panjang.

2. Rasio Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengamatan pada laporan realisasi anggaran dan belanja pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun 2017 rasio keserasian belanja modal sebesar 0,92 dengan realisasi belanja modal mencapai 10.000.000, pada tahun belanja modal sebesar 0 disebabkan oleh tidak adanya belanja modal pada tahun bersangkutan karena belanja modal memberikan jangka menengah dan jangka panjang sehingga tidak rutin untuk belanja modal setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2019 rasio belanja modal mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 4,92% dengan realisasi modal sebesar 77.619.355. pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 0,40% dengan realisasi belanja modal sebesar 115.65.000.

Selama tahun 2017-2015 rata-rata belanja modal sebesar 2,59%.

Analisis Keserasian Belanja Daerah pada umumnya proporsi belanja modal

terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2016:163). Berdasarkan kinerja belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dapat dinilai tidak seimbang dalam keserasian belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja modal. Rata-rata belanja modal sebesar 2,59% hal ini dapat dinilai tidak seimbang karena Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh hanya memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal dan pada tahun 2018 tidak terdapat belanja modal sehingga persentase yang dihasilkan lebih kecil yaitu sebesar 2,59% sedangkan proporsi belanja modal sebesar 5-20%.

4.3.2 Rasio Efektivitas

Analisis efektivitas anggaran belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2017-2020 efektivitas anggaran belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh berada di kategori efektif, cukup efektif dan sangat efektif dengan nilai rasio efektivitas persentase tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 102,16% dengan jumlah anggaran sebesar 1.087.492.506 dan realisasi mencapai 1.110.973.443. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan anggaran yang cukup tinggi sebesar 2.556.223.261 dengan realisasi mencapai 2.396.945.389. walaupun mengalami kenaikan anggaran yang besar Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh masih tetap bisa mempertahankan tingkat efektivitasnya dengan baik. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan dimana realisasi anggaran yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu pengeluaran anggaran

belanja tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja sudah berjalan sesuai dengan target anggaran. Efektifnya anggaran belanja terjadi karena kuatnya Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dalam mengatur target anggaran, sehingga realisasi anggaran belanja sesuai dengan target belanja yang telah ditetapkan. Sehingga Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dapat memproyeksi anggaran secara tepat. Dampak yang terjadi dengan efektifnya anggaran belanja ini adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh akan menambah kepercayaan pemerintah pusat dalam menganggarkan dana Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh.

4.3.3 Rasio Efisiensi

Persentase efisiensi belanja menunjukkan bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh telah mampu melakukan efisiensi belanja untuk tahun anggaran 2017-2020 . Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh tidak melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2014: 118) jika rasio efisiensinya kurang dari 60% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Pada tahun anggaran 2017-2016, efisiensi anggaran belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan persentase dan berada di kategori sangat efisien dengan nilai rasio pada tahun 2017 sebesar 28,15%, tahun 2018 sebesar 27,82%, tahun 2019 sebesar 36,25% dan pada tahun 2020 sebesar 52,46% .

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dapat dikatakan melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensi dari tahun 2017– 2020 selalu

dibawah 60%. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh telah berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga mampu mengefisienkan penggunaan dana belanja dan cenderung hemat dalam melakukan pengeluaran . Sangat efisiennya anggaran belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh terjadi karena tidak adanya kecenderungan pemborosan dalam pengalokasian anggaran belanja. Dengan efisiennya anggaran belanja, dampak yang terjadi adalah akan menambah kepercayaan pemerintah pusat dalam menganggarkan dana kepada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh . sehingga dengan efisiennya anggaran belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh sektor kegiatan yang didanai dapat dilakukan tepat sasaran dan tidak adanya kebocoran dana anggaran belanja melebihi kapasitasnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Kinerja Keuangan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisa Rasio Keserasian

Kinerja Keuangan Belanja dilihat dari Keserasian belanja daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal. Selama tahun 2017-2020 rata-rata Belanja Operasi sebesar 92,44% sedangkan belanja modal sebesar 2,59%. Berdasarkan kinerja belanja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh dapat dinilai tidak seimbang dalam keserasian belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja modal.

2. Analisa Rasio Efektivitas

Berdasarkan Perhitungan dari Rasio Efektifitas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sudah berada dalam kategori efektif dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan hal ini ditunjukkan dengan masih meningkatnya rasio efektifitas yang telah dihitung yaitu sebesar 102,16%, 87,14%, 97,91% dan 93,77%.

3. Analisa Rasio Efisiensi

Kinerja Keuangan dapat dilihat dari efisiensi Belanja Daerah bahwa realisasi anggaran belanja tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja. Artinya

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020 telah melakukan efisiensi belanja hal ini disebabkan dari tahun 2017- 2020 tidak terdapat persentase yang melebihi 100%.

5.2 Saran

1. Diharapkan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh perlu mealokasikan anggaran yang lebih besar dan rasional untuk belanja modal dan membatasi terjadinya pemborosan pada belanja operasi. Karena dengan belanja modal akan meperolehkan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.
2. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan terutama bagian akuntansi di kasubag keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sistem pengendalian intern dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Desi. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Fahmi, Irham. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Halim, A dan Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi 3). Yogyakarta : YKPN.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat
- Hassan Basrie, Fahri Fuady, Chairul Anwar. (2011). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penerimaan Kas (Studi Kasus Pada Pt. Senjaya Rezeki Mas Di Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol.2 No.2.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Kasmir, (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahsun, Mohamad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta Andi Offset.
- Margaretha, Farah. (2014). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Dian Rakyat
- Marina F. Pandjaitan. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2016*. Vol. 6 No. 3, hlm 1398 – 1407.
- Matutina, Ignatia Avianti (2017) Analisis kinerja keuangan belanja daerah Majelis Rakyat Papua Kota Jayapura tahun 2011-2015 studi kasus pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
- Mulyadi. (2007). *Akuntansi Biaya* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: STIE YKPN
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Nordiawan, D dan Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pemedagri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah RI. (2010). Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010 Tentang *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02*, Jakarta.
- Prihartono. (2012). *Manajemen Pelayanan Prima, Dilengkapi Dengan Etika Profesi Untuk Kinerja Kantor*. Bandung : Andi Offset.
- Rahmayati, Anim. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*. Vol 1 No 1, hlm 40 – 54.
- Ravianto J. (2014). *Produktivitas Dan Pengukuran*. Jakarta : Binaman Aksara.
- Republik Indonesia, (2013). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Saputra, Sandy dkk. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Manajemen*. Vol 4 No 2, hlm 136 – 145.
- Sari, Mintarti dan Pattisahusiwa (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Jurnal EMBA*. Vol 6 No 3, Hlm 1398 – 1407.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat : Jakarta.
- Simanjutak, Timbul Hamonangan Dan Imam Muklis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono ,(2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Statiska Untuk Penelitian Bisnis*, Bandung. Alfabeta.
- Sultan. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone. *Jurnal Riset Edisi IV*. Vol 3 No 4, hlm 38 – 49.
- Syahrani (2014). Analisis Kinerja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan. *Jurnal Administrative Reform*, 2014, 2(3):1-10
- Tika, Moh. Pabundu. (2012). *Budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

Urusan : 2.09. - SYARIAT ISLAM
Demokratisasi :
Unit Organisasi : 2.09.04. - SEKRETARIAT MPD

Halaman : 1

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Prognosis	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran			
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7	8
2.09.2.09.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.087.492.506,	1.110.973.443,	(23.480.937,00)	102,16	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	707.629.982,00	798.197.383,00	(90.567.401,00)	112,80	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	707.629.982,00	798.197.383,00	(90.567.401,00)	112,80	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	479.938.382,00	584.692.383,00	(104.754.001,00)	121,83	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Gaji pokok PNS/uang representasi	361.644.770,00	468.059.700,00	(106.414.930,00)	129,43	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Tunjangan keluarga	31.668.986,00	41.202.018,00	(9.533.032,00)	130,10	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Tunjangan jabatan	38.376.000,00	37.440.000,00	936.000,00	97,56	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Tunjangan fungsional umum	22.052.875,00	12.025.000,00	10.027.875,00	54,53	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Tunjangan beras	20.264.927,00	23.029.560,00	(2.764.633,00)	113,64	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2.868.213,00	762.800,00	2.105.413,00	26,59	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Pembulatan gaji	5.518,00	5.362,00	156,00	97,17	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.358.708,00	963.531,00	395.177,00	70,92	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.01.	Iuran Jaminan Kematian	1.698.385,00	1.204.412,00	493.973,00	70,92	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	227.691.600,00	213.505.000,00	14.186.600,00	93,77	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan penghasilan berdasarkan	59.700.000,00	51.900.000,00	7.800.000,00	86,93	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan penghasilan berdasarkan	161.691.600,00	155.305.000,00	6.386.600,00	96,05	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.1.1.02.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	379.862.524,00	312.776.060,00	67.086.464,00	82,34	-	
2.09.2.09.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	264.392.599,00	209.524.335,00	54.868.264,00	79,25	-	
2.09.2.09.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.202.000,00	15.593.736,00	13.608.264,00	53,40	-	
2.09.2.09.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.202.000,00	15.593.736,00	13.608.264,00	53,40	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Prognosis	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran			
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7	8
2.09.2.09.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.202.000,00	15.593.736,00	13.608.264,00	53,40	-	
2.09.2.09.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja telepon	1.080.000,00	678.500,00	401.500,00	62,82	-	
2.09.2.09.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja air	2.796.000,00	530.570,00	2.265.430,00	18,98	-	
2.09.2.09.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja listrik	19.800.000,00	9.240.266,00	10.559.734,00	46,67	-	
2.09.2.09.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.526.000,00	5.144.400,00	381.600,00	93,09	-	
2.09.2.09.04.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.776.000,00	3.476.000,00	300.000,00	92,06	-	
2.09.2.09.04.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.776.000,00	3.476.000,00	300.000,00	92,06	-	
2.09.2.09.04.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.576.000,00	2.576.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.08.5.2.2.01.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan	2.576.000,00	2.576.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	75,00	-	
2.09.2.09.04.01.08.5.2.2.03.	Belanja iuran	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	75,00	-	
2.09.2.09.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.963.799,00	4.963.799,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.963.799,00	4.963.799,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.963.799,00	4.963.799,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja alat tulis kantor	4.963.799,00	4.963.799,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.295.200,00	5.295.200,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.295.200,00	5.295.200,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.295.200,00	5.295.200,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja cetak	4.316.450,00	4.316.450,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja penggandaan	978.750,00	978.750,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	695.000,00	695.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	695.000,00	695.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	695.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	695.000,00	695.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.155.600,00	1.155.600,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.155.600,00	1.155.600,00	-	100,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Prognosis	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran			
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7	8
2.09.2.09.04.01.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.155.600,00	1.155.600,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.13.5.2.2.03.	Belanja propaganda dan dokumentasi	1.155.600,00	1.155.600,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN	32.525.000,00	29.665.000,00	2.860.000,00	91,21	-	
2.09.2.09.04.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.525.000,00	29.665.000,00	2.860.000,00	91,21	-	
2.09.2.09.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.525.000,00	29.665.000,00	2.860.000,00	91,21	-	
2.09.2.09.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman harian	31.460.000,00	28.600.000,00	2.860.000,00	90,91	-	
2.09.2.09.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.065.000,00	1.065.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.19.	PENYEDIAAN JASA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	
2.09.2.09.04.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	
2.09.2.09.04.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-	
2.09.2.09.04.01.19.5.2.1.01.	Honorarium tim pengadaan barang dan	900.000,00	-	900.000,00	-	-	
2.09.2.09.04.01.19.5.2.1.01.	Honorarium panitia pemeriksa barang	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	
2.09.2.09.04.01.20.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS BERKANTORAN	154.380.000,00	118.680.000,00	35.700.000,00	76,88	-	
2.09.2.09.04.01.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	153.300.000,00	117.600.000,00	35.700.000,00	76,71	-	
2.09.2.09.04.01.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.300.000,00	117.600.000,00	35.700.000,00	76,71	-	
2.09.2.09.04.01.20.5.2.1.02.	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	153.300.000,00	117.600.000,00	35.700.000,00	76,71	-	
2.09.2.09.04.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.01.20.5.2.2.03.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	37.869.650,00	36.806.450,00	1.063.200,00	97,19	-	
2.09.2.09.04.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Prognosis	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran			
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7	8
2.09.2.09.04.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal pengadaan printer	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.536.000,00	23.472.800,00	1.063.200,00	95,67	-	
2.09.2.09.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.536.000,00	23.472.800,00	1.063.200,00	95,67	-	
2.09.2.09.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan	24.536.000,00	23.472.800,00	1.063.200,00	95,67	-	
2.09.2.09.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja penggantian suku cadang	9.800.000,00	9.800.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja bahan bakar minyak/gas dan	12.936.000,00	12.936.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja surat tanda nomor kendaraan	1.800.000,00	736.800,00	1.063.200,00	40,93	-	
2.09.2.09.04.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.333.650,00	3.333.650,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.333.650,00	3.333.650,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.333.650,00	3.333.650,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.02.28.5.2.2.20.	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.333.650,00	3.333.650,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	-	
2.09.2.09.04.03.02.5.2.2.12.	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	41.222.511,00	41.147.511,00	75.000,00	99,82	-	
1.01.2.09.04.16.73.	PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR	41.222.511,00	41.147.511,00	75.000,00	99,82	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.875.000,00	20.800.000,00	75.000,00	99,64	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.925.000,00	5.850.000,00	75.000,00	98,73	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.1.01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.1.01.	Honorarium tim teknis	5.175.000,00	5.100.000,00	75.000,00	98,55	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.1.02.	Honorarium tenaga pendukung kegiatan	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100,00	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)			%	Prognosis	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran			
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3	7	8
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.347.511,00	20.347.511,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.621.311,00	3.621.311,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.01.	Belanja alat tulis kantor	3.621.311,00	3.621.311,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.03.	Belanja Jasa Tenaga	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.496.200,00	3.496.200,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.06.	Belanja cetak	1.213.200,00	1.213.200,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.06.	Belanja penggandaan	2.283.000,00	2.283.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.16.73.5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	32.377.764,00	21.297.764,00	11.080.000,00	65,78	-	
1.01.2.09.04.17.69.	MONITORING, EVALUASI DAN	32.377.764,00	21.297.764,00	11.080.000,00	65,78	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.500.000,00	16.500.000,00	9.000.000,00	64,71	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.500.000,00	16.500.000,00	9.000.000,00	64,71	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.1.01.	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.1.01.	Honorarium tim teknis	24.000.000,00	16.500.000,00	7.500.000,00	68,75	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.877.764,00	4.797.764,00	2.080.000,00	69,76	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	872.764,00	872.764,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.01.	Belanja alat tulis kantor	872.764,00	872.764,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.160.000,00	160.000,00	1.000.000,00	13,79	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.03.	Belanja propaganda dan dokumentasi	1.160.000,00	160.000,00	1.000.000,00	13,79	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000,00	1.065.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.06.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.06.	Belanja penggandaan	815.000,00	815.000,00	-	100,00	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	2.700.000,00	1.080.000,00	71,43	-	
1.01.2.09.04.17.69.5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.780.000,00	2.700.000,00	1.080.000,00	71,43	-	
	JUMLAH BELANJA	1.087.492.506,	1.110.973.443,	(23.480.937,00)	102,16	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.087.492.506,	(1.110.973.443,	23.480.937,00	-	-	



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT MPD
NERACA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2019	TAHUN 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
AKTIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
ASET TETAP	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
Tanah	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Kantor	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Peralatan dan Mesin	545.496.879,00	502.739.385,00	42.757.494,00	8,50
Alat-alat Bantu	573.870,00	0	573.870,00	0,00
Pompa	573.870,00	0	573.870,00	0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	65.290.000,00	65.290.000,00	0	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.140.000,00	3.140.000,00	0	0,00
Kendaraan Bermotor Micro Bus	62.150.000,00	62.150.000,00	0	0,00
Alat Kantor	227.668.584,00	220.479.644,00	7.188.940,00	3,26
Alat Kantor Lainnya	11.628.864,00	9.892.334,00	1.736.530,00	17,55
Almari	18.292.410,00	12.840.000,00	5.452.410,00	42,46
Papan Nama Kantor/Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00
Perlengkapan Kantor lainnya	196.247.310,00	196.247.310,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga	80.458.345,00	80.458.345,00	0	0,00
Meubelair	70.266.845,00	70.266.845,00	0	0,00
Alat Dapur	3.496.500,00	3.496.500,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.328.000,00	3.328.000,00	0	0,00
Gorden/Vertical Blind	3.367.000,00	3.367.000,00	0	0,00
Komputer	123.180.946,00	92.760.946,00	30.420.000,00	32,79
Personal Komputer	28.800.000,00	4.800.000,00	24.000.000,00	500,00
Peralatan Mini Komputer	14.342.613,00	14.342.613,00	0	0,00
Printer	16.420.000,00	10.000.000,00	6.420.000,00	64,20
Komputer Lainnya	63.618.333,00	63.618.333,00	0	0,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.142.884,00	12.568.200,00	4.574.684,00	36,40
Meja Rapat Pejabat	5.148.555,00	0	5.148.555,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	11.994.329,00	12.568.200,00	(573.871,00)	(4,57)
Alat Studio	25.276.000,00	25.276.000,00	0	0,00
Peralatan Kamera	9.500.000,00	9.500.000,00	0	0,00
Alat-alat Studio Lainnya	15.776.000,00	15.776.000,00	0	0,00
Alat Komunikasi	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Alat-alat Komunikasi Lainnya	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Gedung dan Bangunan	354.695.980,00	276.340.000,00	78.355.980,00	28,35
Bangunan Gedung Tempat Kerja	354.695.980,00	276.340.000,00	78.355.980,00	28,35
Bangunan Gedung Kantor	334.695.980,00	276.340.000,00	58.355.980,00	21,12
Kelengkapan Gedung (misal Jeruji Besi, Plafon, Penggantian atap, dst)	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(613.703.786,00)	(570.521.571,00)	(43.182.215,00)	7,57
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(504.070.483,00)	(482.092.771,00)	(21.977.712,00)	4,56
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.890.536,00)	(5.890.536,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah	(673.400,00)	(673.400,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(958.516,00)	(958.516,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi	(2.513.640,00)	(2.513.640,00)	0	0,00
Kerja/Rapat Pejabat				

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2019	TAHUN 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(1.357.143,00)	(1.357.143,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(492.677.248,00)	(470.699.536,00)	(21.977.712,00)	4,67
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(109.633.303,00)	(88.428.800,00)	(21.204.503,00)	23,98
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(60.671.253,00)	(60.671.253,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(48.962.050,00)	(27.757.547,00)	(21.204.503,00)	76,39
JUMLAH ASET TETAP	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
JUMLAH AKTIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
FASIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.160.362,00	16.723.000,00	17.437.362,00	104,27
Utang Belanja	34.160.362,00	16.723.000,00	17.437.362,00	104,27
Utang Belanja Pegawai	33.400.000,00	16.630.000,00	16.770.000,00	100,84
Utang Belanja Tambahan Pengehasilan	33.400.000,00	16.630.000,00	16.770.000,00	100,84
Utang Belanja Barang dan Jasa	760.362,00	93.000,00	667.362,00	717,59
Utang Belanja Jasa	760.362,00	93.000,00	667.362,00	717,59
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.160.362,00	16.723.000,00	17.437.362,00	104,27
EKUITAS.	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
Ekuitas..	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
Ekuitas...	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(34.160.362,00)	(16.723.000,00)	(17.437.362,00)	104,27
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
JUMLAH FASIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT MPD
NERACA

Per 29 Desember 2017 dan 2016

Halaman 1

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2017	TAHUN 2016	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
AKTIVA	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)
ASET TETAP	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)
Tanah	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Kantor	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Peralatan dan Mesin	499.599.385,00	427.449.385,00	72.150.000,00	16,88
Alat Angkutan Darat Bermotor	62.150.000,00	0	62.150.000,00	0,00
Kendaraan Bermotor Micro Bus	62.150.000,00	0	62.150.000,00	0,00
Alat Kantor	220.479.644,00	220.479.644,00	0	0,00
Alat Kantor Lainnya	9.892.334,00	9.892.334,00	0	0,00
Almari	12.840.000,00	12.840.000,00	0	0,00
Papan Nama Kantor/Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00
Perlengkapan Kantor lainnya	196.247.310,00	196.247.310,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga	80.458.345,00	80.458.345,00	0	0,00
Meubelair	70.266.845,00	70.266.845,00	0	0,00
Alat Dapur	3.496.500,00	3.496.500,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.328.000,00	3.328.000,00	0	0,00
Gorden/Vertical Blind	3.367.000,00	3.367.000,00	0	0,00
Komputer	92.760.946,00	82.760.946,00	10.000.000,00	12,08
Personal Komputer	4.800.000,00	4.800.000,00	0	0,00
Peralatan Mini Komputer	14.342.613,00	14.342.613,00	0	0,00
Printer	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0,00
Komputer Lainnya	63.618.333,00	63.618.333,00	0	0,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.568.200,00	12.568.200,00	0	0,00
Kursi Kerja Pejabat	12.568.200,00	12.568.200,00	0	0,00
Alat Studio	25.276.000,00	25.276.000,00	0	0,00
Peralatan Kamera	9.500.000,00	9.500.000,00	0	0,00
Alat-alat Studio Lainnya	15.776.000,00	15.776.000,00	0	0,00
Alat Komunikasi	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Alat-alat Komunikasi Lainnya	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Gedung dan Bangunan	276.340.000,00	326.120.000,00	(49.780.000,00)	(15,26)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	276.340.000,00	326.120.000,00	(49.780.000,00)	(15,26)
Bangunan Gedung Kantor	276.340.000,00	326.120.000,00	(49.780.000,00)	(15,26)
Aset Tetap Lainnya	0	5.907.600,00	(5.907.600,00)	(100,00)
Buku	0	5.907.600,00	(5.907.600,00)	(100,00)
Buku Perpustakaan Sekolah	0	5.907.600,00	(5.907.600,00)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan	(513.097.368,00)	(429.011.809,00)	(84.085.559,00)	19,60
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(430.195.368,00)	(349.645.409,00)	(80.549.959,00)	23,04
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.890.536,00)	(5.890.536,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah	(673.400,00)	(673.400,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(958.516,00)	(958.516,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi	(2.513.640,00)	(2.513.640,00)	0	0,00
Kerja/Rapat Pejabat				
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(1.357.143,00)	(1.357.143,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(418.802.133,00)	(338.252.174,00)	(80.549.959,00)	23,81
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(82.902.000,00)	(79.366.400,00)	(3.535.600,00)	4,45

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2017	TAHUN 2016	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(60.671.253,00)	(60.671.253,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(22.230.747,00)	(18.695.147,00)	(3.535.600,00)	18,91
JUMLAH ASET TETAP	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)
JUMLAH AKTIVA	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)
FASIVA	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.220.000,00	12.525.000,00	1.695.000,00	13,53
Utang Belanja	14.220.000,00	12.525.000,00	1.695.000,00	13,53
Utang Belanja Pegawai	14.155.000,00	12.525.000,00	1.630.000,00	13,01
Utang Belanja Tambahan Pengehasilan	14.155.000,00	12.525.000,00	1.630.000,00	13,01
Utang Belanja Barang dan Jasa	65.000,00	0	65.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa	65.000,00	0	65.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.220.000,00	12.525.000,00	1.695.000,00	13,53
EKUITAS.	415.222.017,00	484.540.176,00	(69.318.159,00)	(14,31)
Ekuitas..	415.222.017,00	484.540.176,00	(69.318.159,00)	(14,31)
Ekuitas...	415.222.017,00	484.540.176,00	(69.318.159,00)	(14,31)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(14.220.000,00)	(12.525.000,00)	(1.695.000,00)	13,53
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	415.222.017,00	484.540.176,00	(69.318.159,00)	(14,31)
JUMLAH FASIVA	429.442.017,00	497.065.176,00	(67.623.159,00)	(13,60)



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT MPD
NERACA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2019	TAHUN 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
AKTIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
ASET TETAP	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
Tanah	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Kantor	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Peralatan dan Mesin	545.496.879,00	502.739.385,00	42.757.494,00	8,50
Alat-alat Bantu	573.870,00	0	573.870,00	0,00
Pompa	573.870,00	0	573.870,00	0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	65.290.000,00	65.290.000,00	0	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.140.000,00	3.140.000,00	0	0,00
Kendaraan Bermotor Micro Bus	62.150.000,00	62.150.000,00	0	0,00
Alat Kantor	227.668.584,00	220.479.644,00	7.188.940,00	3,26
Alat Kantor Lainnya	11.628.864,00	9.892.334,00	1.736.530,00	17,55
Almari	18.292.410,00	12.840.000,00	5.452.410,00	42,46
Papan Nama Kantor/Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00
Perlengkapan Kantor lainnya	196.247.310,00	196.247.310,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga	80.458.345,00	80.458.345,00	0	0,00
Meubelair	70.266.845,00	70.266.845,00	0	0,00
Alat Dapur	3.496.500,00	3.496.500,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.328.000,00	3.328.000,00	0	0,00
Gorden/Vertical Blind	3.367.000,00	3.367.000,00	0	0,00
Komputer	123.180.946,00	92.760.946,00	30.420.000,00	32,79
Personal Komputer	28.800.000,00	4.800.000,00	24.000.000,00	500,00
Peralatan Mini Komputer	14.342.613,00	14.342.613,00	0	0,00
Printer	16.420.000,00	10.000.000,00	6.420.000,00	64,20
Komputer Lainnya	63.618.333,00	63.618.333,00	0	0,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.142.884,00	12.568.200,00	4.574.684,00	36,40
Meja Rapat Pejabat	5.148.555,00	0	5.148.555,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	11.994.329,00	12.568.200,00	(573.871,00)	(4,57)
Alat Studio	25.276.000,00	25.276.000,00	0	0,00
Peralatan Kamera	9.500.000,00	9.500.000,00	0	0,00
Alat-alat Studio Lainnya	15.776.000,00	15.776.000,00	0	0,00
Alat Komunikasi	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Alat-alat Komunikasi Lainnya	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Gedung dan Bangunan	354.695.980,00	276.340.000,00	78.355.980,00	28,35
Bangunan Gedung Tempat Kerja	354.695.980,00	276.340.000,00	78.355.980,00	28,35
Bangunan Gedung Kantor	334.695.980,00	276.340.000,00	58.355.980,00	21,12
Kelengkapan Gedung (misal Jeruji Besi, Plafon, Penggantian atap, dst)	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(613.703.786,00)	(570.521.571,00)	(43.182.215,00)	7,57
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(504.070.483,00)	(482.092.771,00)	(21.977.712,00)	4,56
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.890.536,00)	(5.890.536,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah	(673.400,00)	(673.400,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(958.516,00)	(958.516,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi	(2.513.640,00)	(2.513.640,00)	0	0,00
Kerja/Rapat Pejabat				

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2019	TAHUN 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(1.357.143,00)	(1.357.143,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(492.677.248,00)	(470.699.536,00)	(21.977.712,00)	4,67
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(109.633.303,00)	(88.428.800,00)	(21.204.503,00)	23,98
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(60.671.253,00)	(60.671.253,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(48.962.050,00)	(27.757.547,00)	(21.204.503,00)	76,39
JUMLAH ASET TETAP	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
JUMLAH AKTIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
FASIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.160.362,00	16.723.000,00	17.437.362,00	104,27
Utang Belanja	34.160.362,00	16.723.000,00	17.437.362,00	104,27
Utang Belanja Pegawai	33.400.000,00	16.630.000,00	16.770.000,00	100,84
Utang Belanja Tambahan Pengehasilan	33.400.000,00	16.630.000,00	16.770.000,00	100,84
Utang Belanja Barang dan Jasa	760.362,00	93.000,00	667.362,00	717,59
Utang Belanja Jasa	760.362,00	93.000,00	667.362,00	717,59
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.160.362,00	16.723.000,00	17.437.362,00	104,27
EKUITAS.	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
Ekuitas..	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
Ekuitas...	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(34.160.362,00)	(16.723.000,00)	(17.437.362,00)	104,27
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	418.928.711,00	358.434.814,00	60.493.897,00	16,88
JUMLAH FASIVA	453.089.073,00	375.157.814,00	77.931.259,00	20,77



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT MPD
NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2020	TAHUN 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
AKTIVA	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70
ASET TETAP	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70
Tanah	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Tanah Kantor	166.600.000,00	166.600.000,00	0	0,00
Peralatan dan Mesin	659.246.879,00	545.496.879,00	113.750.000,00	20,85
Alat-alat Bantu	573.870,00	573.870,00	0	0,00
Pompa	573.870,00	573.870,00	0	0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	65.290.000,00	65.290.000,00	0	0,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.140.000,00	3.140.000,00	0	0,00
Kendaraan Bermotor Micro Bus	62.150.000,00	62.150.000,00	0	0,00
Alat Kantor	227.668.584,00	227.668.584,00	0	0,00
Alat Kantor Lainnya	11.628.864,00	11.628.864,00	0	0,00
Almari	18.292.410,00	18.292.410,00	0	0,00
Papan Nama Kantor/Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00
Perlengkapan Kantor lainnya	196.247.310,00	196.247.310,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga	86.458.345,00	80.458.345,00	6.000.000,00	7,46
Meubelair	70.266.845,00	70.266.845,00	0	0,00
Alat Pendingin	1.300.000,00	0	1.300.000,00	0,00
Alat Dapur	3.496.500,00	3.496.500,00	0	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.428.000,00	3.328.000,00	(1.900.000,00)	(57,09)
	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0,00
Gorden/Vertical Blind	3.367.000,00	3.367.000,00	0	0,00
Aksesoris	600.000,00	0	600.000,00	0,00
Komputer	228.030.946,00	123.180.946,00	104.850.000,00	85,12
Personal Komputer	28.800.000,00	28.800.000,00	0	0,00
Peralatan Mini Komputer	113.942.613,00	14.342.613,00	99.600.000,00	694,43
Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	2.300.000,00	0	2.300.000,00	0,00
Printer	19.370.000,00	16.420.000,00	2.950.000,00	17,97
Komputer Lainnya	63.618.333,00	63.618.333,00	0	0,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.142.884,00	17.142.884,00	0	0,00
Meja Rapat Pejabat	5.148.555,00	5.148.555,00	0	0,00
Kursi Kerja Pejabat	11.994.329,00	11.994.329,00	0	0,00
Alat Studio	28.176.000,00	25.276.000,00	2.900.000,00	11,47
Peralatan Kamera	9.500.000,00	9.500.000,00	0	0,00
Peralatan Sound System	2.900.000,00	0	2.900.000,00	0,00
Alat-alat Studio Lainnya	15.776.000,00	15.776.000,00	0	0,00
Alat Komunikasi	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Alat-alat Komunikasi Lainnya	5.906.250,00	5.906.250,00	0	0,00
Gedung dan Bangunan	354.695.980,00	354.695.980,00	0	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	354.695.980,00	354.695.980,00	0	0,00
Bangunan Gedung Kantor	334.695.980,00	334.695.980,00	0	0,00
Kelengkapan Gedung (misal Jeruji Besi, Plafon, Penggantian atap, dst)	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	(660.844.203,00)	(613.703.786,00)	(47.140.417,00)	7,68

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN/PENURUNAN	
	TAHUN 2020	TAHUN 2019	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(544.761.882,00)	(504.070.483,00)	(40.691.399,00)	8,07
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.890.536,00)	(5.890.536,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah	(673.400,00)	(673.400,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(958.516,00)	(958.516,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(2.513.640,00)	(2.513.640,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(1.357.143,00)	(1.357.143,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(533.368.647,00)	(492.677.248,00)	(40.691.399,00)	8,26
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(116.082.321,00)	(109.633.303,00)	(6.449.018,00)	5,88
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(60.671.253,00)	(60.671.253,00)	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan	(55.411.068,00)	(48.962.050,00)	(6.449.018,00)	13,17
JUMLAH ASET TETAP	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70
JUMLAH AKTIVA	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70
FASIVA	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	228.558.350,00	34.160.362,00	194.397.988,00	569,07
Utang Belanja	228.558.350,00	34.160.362,00	194.397.988,00	569,07
Utang Belanja Pegawai	62.674.500,00	33.400.000,00	29.274.500,00	87,65
Utang Belanja Tambahan Pengehasilan	62.674.500,00	33.400.000,00	29.274.500,00	87,65
Utang Belanja Barang dan Jasa	165.883.850,00	760.362,00	165.123.488,00	21.716,4
Utang Belanja Jasa	160.429.850,00	760.362,00	159.669.488,00	20.999,1
Utang Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	0	344.000,00	0,00
Utang Belanja Makanan dan Minuman	5.110.000,00	0	5.110.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	228.558.350,00	34.160.362,00	194.397.988,00	569,07
EKUITAS.	291.140.306,00	418.928.711,00	(127.788.405,00)	(30,50)
Ekuitas..	291.140.306,00	418.928.711,00	(127.788.405,00)	(30,50)
Ekuitas...	291.140.306,00	418.928.711,00	(127.788.405,00)	(30,50)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(228.558.350,00)	(34.160.362,00)	(194.397.988,00)	569,07
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	291.140.306,00	418.928.711,00	(127.788.405,00)	(30,50)
JUMLAH FASIVA	519.698.656,00	453.089.073,00	66.609.583,00	14,70